

Daftar Isi

Social Construction of Consumptivism, and the Role of Architecture: A Perspective of Architectural Sociology	
Tommy S. S. Eisenring	283–290
Social Conflict and Control Over Forests Land in Lampung	
Muryani	291–297
Social Impact Assessment: Can and Should It Empower Community?	
Sulikah Asmorowati	298–305
Perubahan Ekosistem di Lahan Kering	
Rustinsyah	306–317
Disparitas antarwilayah di Jawa Timur	
Karnaji	318–327
Kebijakan Pengampunan Pajak (<i>Tax Amnesty</i>) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi <i>Sunset Policy</i> berdasarkan UU No 28 tahun 2007]	
Bintoro Wardiyanto	328–335
Indegenisasi dan Reproduksi Pengetahuan Kapitalisme dalam Jaringan Kekuasaan di Dunia Ketiga	
S. Aminah	336–351
Kerja sama Kontra-Terrorisme Indonesia-Australia: Perbandingan Antara Masa Pemerintahan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono	
Silvia Haryani	352–360
Tindakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi dalam Menangani Permasalahan TKI di Arab Saudi	
Imanuella Tamara Geerards	361–370

Indegenisasi dan Reproduksi Pengetahuan Kapitalisme dalam Jaringan Kekuasaan di Dunia Ketiga

S. Aminah¹

Departemen Politik, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya

ABSTRACT

Social sciences in the third world have been occupied by modernization theories since the 20th century. The results of various research were assumed to be able to help to freeing underdeveloped countries, which in the modernization discourse has been called the third world countries. An adequate approach is needed to understand the history of Western social sciences that have been very close to the social sciences tradition since the 19th century, as the antinomy between mothetic-ideographic and universality-particularism concepts. The object of social science analitic, space and time variables have become critical debate, as the dilemma in the non-Western countries, between the universality and particularity, and nomothetic versus ideographic. Critical social theory has deconstructed the law of capitalism, patriarchy, racism, and the domination upon nature. This theory views positivism has frozen the social facts so that it dominates the others. Critical theoreticians think that positivism is no longer a knowlede but an ideology. Hegemony through the structure of capitalism has influenced the theoretic-methodologic, so that social system has experience the limited movement due to the domination of positivism as a capitalism theoretical product.

Key words: capitalism, ideology, knowledge, positivism

Meski sudah lebih hampir seabad, kajian ilmu-ilmu sosial umumnya, dan sosiologi khususnya menaruh perhatian pada persoalan tentang cara negara-negara Barat membangun dan menciptakan teknologi untuk kepentingan pemberadaban manusia. Upaya merubah keadaan tradisional menjadi keadaan modern (masyarakat rasional atau masyarakat kapitalis) ditempuh dengan proses saintifikasi. Pembacaan fenomena saintifikasi terhadap usaha-usaha rasional untuk memajukan peradaban manusia adalah proses dari ideologisasi pengetahuan. Aktor-aktor pembangun pengetahuan seperti komunitas ilmuwan memperoleh dukungan struktural dari penguasa. Keterlibatan penguasa sebagai produser pengetahuan mennghasilkan ideologi-ideologi baru. Dalam proses itulah kapitalisasi pengetahuan atau teknologisasi pengetahuan terus berlangsung, kendati tidak berlangsung secara akumulatif, tetapi evolusi dari kerja-kerja komunitas ilmuwan dan struktur politik telah melahirkan paradigma pengetahuan yang berlaku umum. Kapitalisme adalah sebagai kebenaran dan kebaruan untuk kehidupan masyarakat.

Pasca Perang Dunia II, analisis keilmuan tidak hanya menguak tentang produk-produk teori

yang lahir dalam masa Perang Dingin, melainkan juga melahirkan berbagai perspektif kritis yang mengungkap kelemahan-kelemahan epistemologi kapitalisme. Hampir selama separuh abad itu, kajian sosiologi fokusnya membicarakan bagaimana masyarakat atau negara-negara terbelakang atau yang sedang berkembang bisa mengikuti langkah-langkah menuju masyarakat kapitalis maju, atau menjadi modern yang tidak lain penyebaran rasionaisasi. Meski Dunia Ketiga, akhirnya tidak berhasil sepenuhnya mengikuti tahap-tahap pemajuan pengetahuan menurut *mode of production* Barat/Dunia Pertama.

Kapitalisme adalah produk pengetahuan yang terus menerus diperbarui secara akademik. Tiada kebijakan politik yang lahir bebas dari pengaruh kerja-kerja komunitas ilmuwan/intelektual. Produksi dan interpretasi terhadap pengetahuan modernisasi, kapitalisme banyak dipengaruhi oleh kerja-kerja akademik ilmuwan. Semenjak abad ke-20, ilmu-ilmu sosial di Dunia Ketiga banyak didominasi oleh diskursus teori modernisasi yang memiliki keunggulan universal. Semenjak itu pula konsentrasi kajian ilmuwan sosial, untuk memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi

¹ Korespondensi: S. Aminah. Departemen Ilmu Politik, FISIP, UNAIR. Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia. Telp: (031)5011 744. E-mail: ami_unair@yahoo.com

baru disebarluaskan melalui textbook-textbook, jurnal ilmiah yang memuat hasil-hasil riset mereka. Tujuannya untuk melegitimasi penjajahan ilmu di Dunia Ketiga. Dalihnya adalah teori-teori yang dihasilkan ilmuwan Barat dapat membantu membebaskan keterbelakangan sebuah negara menuju pemberadaban manusia secara materi yang benar-benar menghargai martabat individu.

Mengkritisi sifat universal sistem kapitalisme sudah banyak dilakukan, tetapi bagaimana sistem kapitalisme diproduksi untuk diadopsi dan direplikasi atau direproduksi dalam konteks pembangunan negara-negara di Dunia Ketiga menjadi kajian penting, khususnya berkenaan dengan penempatan sistem kapitalisme sebagai model pembangunan. Ada argumentasi lain, bahwa studi-studi tentang praktik sistem kapitalisme sudah banyak dilakukan oleh Yoshihara Kunio, Peter L. Berger, Richard Robison, Andre Gunder Frank, James F. Petras, Arief Budiman, Vedi R Hadiz, mereka menempatkan kapitalisme sebagai sistem ekonomi, yang tak lain di Dunia Ketiga menjadi sistem neokolonialisme.

Kajian-kajian tentang sistem kapitalisme lebih banyak dilihat dari aspek praksis, dan menggunakan pendekatan ekonomi politik atau politik ekonomi. Karena itu, ilmuwan sosial menghadapi tantangan jika dilihat dari praktik, karya dan pemikirannya yaitu teori yang dihasilkan, dan dikembangkan umumnya berasal dari kritikan, penafsiran, termasuk paparan dari hasil kerja-kerja ilmiahnya seperti riset yang seringkali digunakan juga untuk membangun opini masyarakat, sehingga akhirnya muncul pemahaman baru dan pengetahuan baru.

Untuk memahami sejarah ilmu-ilmu sosial Barat yang melekat kuat dalam tradisi ilmu-ilmu sosial sejak abad ke-19 adalah menggunakan pendekatan antinomi yang menguraikan antara konsep nomotetik-ideografik, dan universalitas-partikularisme (Wallerstein, 2004). Pendekatan ini terkait dengan pemunculan atau penamaan disiplin akademis. Pendekatan ini juga merefleksikan kemenangan kekuasaan ideologi liberal. Fokus dari disiplin akademis itu terletak pada analisis tentang

proses sosial dari lingkup pasar, negara dan yang personal, dan ini merupakan suatu kesatuan. Kajian dari tiga lingkup tersebut terpisah, dinamakan ilmu politik, ekonomi, dan sosiologi. Wallerstein memberi julukan disiplin tersebut sebagai nomotetik.

Ketiga disiplin ilmu itu menerapkan hukum-hukum universal yang diaplikasikan melampaui waktu dan tempat. Menguatnya kecenderungan fenomena seperti itu menggugah Seidman untuk memberikan argumentasinya, teori sosial tidak dapat dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan teoretisi asing, tetapi oleh moral, politik dan sosial.² Herbert Marcuse dalam karyanya *One Dimensionality* (1964) melakukan kritik tajam atas positivisme dan saintifik yang dianggap telah meresapi dasar-dasar kesadaran masyarakat modern.

Gagasan tentang manusia satu dimensi dan masyarakat satu dimensi sebenarnya dimaksudkan untuk menegaskan posisi rasio manusia yang menjadi adaptif, instrumental dan buta. Sehingga dalam situasi penguasaan total oleh ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah berubah menjadi ideology, rasio kritis manusia dan masyarakat tidak memiliki daya apapun. Marcuse memperingatkan atas bahaya yang mengancam dunia dan umat manusia akibat pesatnya kemajuan teknologi yang menguasai kehidupan manusia.³

Masyarakat berdimensi satu merupakan masyarakat yang bersikap reseptif dan pasif sehingga semakin menguatkan dominasi atas diri masyarakat tersebut. Karena itu, dominasi tidak lagi dirasakan dan disadari sebagai sesuatu yang tidak wajar. Maksudnya adalah bahwa manusia modern sudah kehilangan prinsip kritisnya, dan dominasi yang dialami manusia melalui represi politik atau dominasi satu kelas atas kelas yang lain sudah tidak lagi menjadi hal yang relevan dan penting. Terdapat manipulasi kebutuhan, dan kontrol sosial pun menjadi semakin efektif.

Kapitalisme, bagaimanapun sulit dipisahkan dari klaim-klaim universalitasnya. Apa pun objek analisis ilmu sosial, variabel ruang dan waktu dalam sejarah kapitalisme di negara-negara nonBarat berada dalam

² Lihat Seidman *The End of Sociological Theory: The Postmodern Age* (1991) yang menjelaskan, teori sosial menggambarkan alternatif yang riil terhadap teori sosiologi. Teori-teori sosial merupakan cerita-cerita sosial atau narasi-narasi yang sangat berhubungan dengan himpitan persoalan-persoalan sosial saat ini. Karenanya, teori sosial tidak hanya berorientasi pada pemahaman persoalan-persoalan secara lebih baik, tetapi juga berdampak pada produk-produk sosial. Bahasan tentang perlunya visi moral dari ilmu-ilmu sosial, dibahas lebih lanjut oleh Steven Seidman dalam *Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era*, (1988), Second edition, Massachusett, Blackwell Pub.

³ Gagasan-gagasan tersebut antara lain tertulis pada bukunya yang berjudul *One Dimensional Man*. Dalam buku tersebut Marcuse mengkritik masyarakat industri modern. Teknologi dianggap dapat mengancam keberlangsungan hidup, karena teknologi itu punya sifat menjajah masyarakat dengan dalih memudahkan segala urusan kehidupan yang bermasalah. Segala masalah dapat diselesaikan dengan teknologi. Dalam konteks ini, Marcuse menyebut teknologi sebagai agama baru masyarakat modern. Masyarakat hanya akan hidup dan bekerja untuk mendapatkan teknologi yang dianggap mampu membantunya menghadapi masalah kehidupan. Berawal dari sisi, kemudian terjadi masyarakat yang disebutnya masyarakat sakit.

dilema antara universalitas dan partikular, dan nomotetik versus ideografis, yang terus-menerus menjadi perdebatan kritis hingga saat ini.

Ilmu-ilmu sosial masuk dalam proses hegemonisasi melalui struktur kapitalisme. Sehingga tataran teoretis-metodologis ilmu-ilmu sosial mengalami keterbatasan gerak, karena dominasi positivisme merupakan produk teoretik dari sistem kapitalisme. Posisi dari kekuatan positivisme yang menekankan aspek kuantitatif, empiris, dan *causal laws* juga mendominasi metodologi ilmu-ilmu sosial. Ini pada gilirannya memarginalkan metodologi antipositivisme yang bersifat lebih kualitatif, normatif, dan interpretatif.

Sistem kapitalisme dalam praktiknya pada semua belahan bumi ditempatkan sebagai sistem pengetahuan yang memengaruhi proses pembuatan kebijakan publik. Ilmu-ilmu sosial, karena itu dituntut untuk lebih kritis terhadap perkembangan kapitalisme saat ini. Kapitalisme merupakan ancaman bagi masyarakat terbuka (tesis Soros). Ini disebabkan berjalannya kapitalisme sudah di luar jalurnya. Dalam konsepsi Anthony Giddens, modernitas bisa berlangsung, karena ditopang oleh kekuatan kapitalisme, negara bangsa, organisasi militer dan industrialisasi (Giddens, 1990). Dalam konteks ini, kapitalisme sebagai prinsip struktural yang mendasari praktik akumulasi modal dalam kerangka pasar produksi dan tenaga kerja yang kompetitif.

Epistemologi Kapitalisme

Memahami pengetahuan ilmiah melalui dimensi sosial secara epistemologis penting. Karena pengetahuan ilmiah adalah karya manusia sebagai spesies yang tidak pernah lepas dari dunia sosial dan lingkungannya. Pengetahuan ilmiah selama ini dipahami sebagai hasil murni kemampuan logika manusia yang terpisah dari faktor sosial. Sebuah temuan pokok dari laporan Komisi Gulbenkian tentang ilmu sosial menunjukkan bahwa berakhirnya pengetahuan telah terjadi (Wallerstein *et. al*, 1996).⁴

Kejadian ini sebagai akibat munculnya relasi baru antara produser pengetahuan dan masyarakat, dan hubungan baru antara ilmu-ilmu yang ada. Proses

terjadinya pergolakan rakyat melawan kapitalisme/neoliberalisme maupun globalisasi di Amerika Latin diamati James Petras sebagai salah satu peristiwa menarik yang tak luput dari peranan intelektual. Begitu pula pandangan Foucault maupun Tim Dant, kedua ilmuwan ini dengan pendirian kritisnya menganalisis persoalan kapitalisme, modernisasi sebagai persoalan yang tidak bisa dipisahkan dari peranan intelektual yang turut memproduksi dan melanggengkan kapitalisme tersebut.⁵ Begitu halnya Berger, yakin sepenuhnya, kapitalisme sebagai ideologi yang memenangi pertarungan menghadapi komunisme dan sosialisme. Pengetahuan diproduksi, direproduksi dan direplikasi sesuai kebutuhan pemilik pengetahuan.

Isu-isu kritis terus menyelimuti teori-teori kapitalisme, imperialisme dan juga globalisasi. Kekritisan itu menyoalkan universalitas kapitalisme, yang diklaim sebagai ideologi, dan mampu memberikan pencerahan dalam membangun kehidupan manusia di dunia. Proposisi itu logis karena dibangun oleh ilmuwan dan intelektual. Nilai pijakannya pun jelas, kapitalisme dapat mengatasi persoalan historis, tempat/ruang dan waktu.

Tetapi bagaimanapun pencecaran terhadap universalitas kapitalisme terus menjadi diskursus dari ilmuwan dan intelektual ilmu-ilmu sosial. Mereka benar-benar menyangsikan kebenaran pengetahuan kapitalisme. Hingga mencapai suatu titik, kepalsuan dan kebohongan kapitalisme terungkap dalam pemikiran Foucault maupun teoretisi pascakolonial yang terus mencoba membongkar validitas pengetahuan kapitalisme.

Meski, bentuk-bentuk kebenaran sudah dibangun berdasar perkembangan peradaban Barat. Akan tetapi kenyataannya, kapitalisme tidak pernah berhenti menjadi pengetahuan berdimensi tunggal. Di dalam tubuh kapitalisme ada ideologi tersembunyi lain, yaitu imperialisme. Imperialisme yang tersebar di Dunia Ketiga ada, karena proses kontinuitas kuasa kapital dan imperialisme yang dibentuk melalui logika positivis. Logika ini terus berputar tanpa mengenal titik jenuh untuk akumulasi dan produksi kebutuhan manusia.

Proses akumulasi kapital dan perkembangan kapitalisme, dalam pemahaman samir Amin

⁴ Dikutip dari Gerard Delanty (2001). *Challenging Knowledge: The University in the Knowledge Society*, SRHE and Open University, UK, Buckingham, h. 105.

⁵ Baca Ankie Hoogvelt (1997) *Globalisation and the Postcolonial World, the New Political Economy of Development*, MacMillan Press, London, khususnya Bab 3 dan Bab 8.

merupakan proses tunggal berskala dunia. Pada saat ini dunia berada dalam cengkeraman formasi sosial kapitalisme. Sebagaimana formasi-formasi sosial sebelumnya, yang terpilah menjadi pusat dan pinggiran, maka formasi sosial kapitalisme tampilannya serupa. Kapitalisme berangkat dari Eropa Barat abad ke-17 dan terus bergerak invatif ke seluruh penjuru dunia. Daya lentur dan adaptif yang tinggi dari kapitalisme, memudahkan kapitalisme berkembang biak menjadi aneka ragam produksi. Kapitalisme pun merambah Asia, Afrika dan melebur beradaptasi dengan ragam sosio kultural setempat, sehingga kapitalisme yang muncul disebut sebagai kapitalisme pinggiran.

Perkembangan ragam produksi kapitalisme tidaklah sama antara di pusat dan pinggiran. Akumulasi kapital dan perkembangan kapitalisme di pusat merupakan suatu proses yang utuh-menyatu. Sektor pertanian berkembang selaras dengan sektor industri dan kedua-duanya saling melengkapi. Kapitalisme di pusat dibangun dinamikanya sendiri atau berkembang dari dalam. Sebaliknya, akumulasi kapital dan perkembangan kapitalisme di pinggiran merupakan hasil proses ketergantungan terhadap pusatnya. Oleh karena itu, kapitalisme di pinggiran berbeda dengan kapitalisme di pusat. Perkembangan di pinggiran dicirikan tidak selarasnya hubungan antarsektor karena kapitalisme di pinggiran hanya melayani perkembangan kapitalisme di pusat. Kapitalisme di pinggiran terutama menghasilkan bahan baku dan beberapa barang dagangan bukan alat-alat produksi utama. Kapitalisme pinggiran hanya menjadi kaki tangan kapitalisme pusat (Amin, 1976).

Melalui wacana globalisasi, perkembangan kapitalisme pada kondisi sekarang untuk membangun mitos bahwa kapitalisme global mendorong tumbuhnya sistem politik yang demokratis sebagaimana yang digagas Lipset terus dibangun. Kekuatan pemaksa globalisasi sebagaimana ditengarai Riain dapat berdampak pada perkembangan kondisi di tingkat lokal. Relasi negara, dan pasar terkonstruksi melalui interaksinya tersebut

(Riain, 2000). Ini menunjukkan, adopsi pengetahuan kapitalisme di Dunia Ketiga secara epistemologis memiliki kelemahan. Manuel Castels menerangkan bahwa sistem ekonomi global adalah sebagai salah satu dari tiga fenomena historis yang merubah secara drastis tata nilai peradaban dunia. Sementara itu, dua lainnya adalah revolusi teknologi informasi dan produk ekonomi baru, yaitu *weightless economy*.⁶ Pergerakan sistem ekonomi global ini telah berhasil menembus batas-batas geografis, sehingga disebut sebagai *borderless economy*. Sistem ekonomi kapitalisme global telah memperlakukan dunia sebagai satu kesatuan entitas ekonomi secara utuh dengan konsep satu planet dan satu kebutuhan.

Eksistensi pengetahuan kapitalisme dalam konteks globalisasi tak luput dari pergeseran peranan Negara dan universitas di dalam memproduksi pengetahuan itu.⁷ Dalam masa globalisasi ilmuwan sosial dituntut untuk lebih memperhatikan aplikasi langsung pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah social. C.Wright Mills dan Alfred McClung Lee, dan juga Robert Merton menegaskan pentingnya peranan intelektual dan juga ilmuwan dalam proses penyusunan kebijakan publik. Meski intelektual dan ilmuwan menghadapi dilemma ketika berhadapan dengan birokrasi publik, tetapi dengan pengetahuan yang dimiliki intelektual dan ilmuwan sosial dapat berkontribusi di dalam membangun pengetahuan dalam kegiatan pembuatan kebijakan publik. Pengetahuan ilmuwan sosial bisa dimanfaatkan sejauh ilmuwan tersebut bekerja sama dengan struktur kekuasaan. Implikasinya dari hal ini adalah ilmuwan dipastikan kehilangan sebagian atas kebebasan yang dimilikinya untuk mendalami dan memahami subyeknya.

Epistemologi, ontologi adalah bagian dari analisis kritis dari kerja-kerja ilmiah para ilmuwan-ilmuwan Dunia Pertama dan Dunia Ketiga. Berbagai pendekatan, teori, konsep baru bermunculan. Para ilmuwan dan intelektual dari disiplin ilmu sosial yang dikenal dengan Mazhab Frankfurt salah satu pelopor yang mengkritisi berbagai kelemahan dari

⁶ *Weightless economy* mengacu pada perekonomian yang produknnya adalah informasi, seperti perangkat lunak komputer, produk media, hiburan, dan jasa berbasis internet. Negroponte (1995) menyebutnya sebagai '*information superhighway*' dan '*knowledge economy*' dan Alan Burton Jones menamakan '*knowledge capitalism*', Peter Drucker mengatakan sebagai '*postcapitalist society*', serta Anthony Giddens menyebut dengan '*the third way*', sebagai masa yang bukan kapitalis dan bukan sosialis. di mana informasi mengalir dengan deras dan ekonomi dibangun di atas dasar pengetahuan atau fokus industri bergeser pada produksi dan manajemen pengetahuan.

⁷ Lihat Delanty (2001). *Challenging Knowledge: The University in the Knowledge Society*, SRHE and Open University, UK, Buckingham, terutama Bab 10: *The New Politics of Knowledge: Culture Wars, Identity and Multiculturalism*, h.142–150, lihat juga bahasannya tentang '*Globalisation and Academic Capitalism: The New Knowledge Flow*'.

sistem kapitalisme.⁸ Pendekatan atau paradigma modern menurut teoretisi Mazhab Kritis sudah berakhir, di mana Michel Foucault sebagai pelopor aliran pascastrukturalis coba mengkritisi paradigma modernisme tersebut (Foucault, 1980; 2003). Foucault menegaskan, proses muncul dan berkembangnya ilmu pengetahuan sangat terkait dengan relasi kekuasaan. Ilmu pengetahuan akan semakin dominan dan dianut kebenarannya oleh masyarakat akademik apabila ditopang secara kuat oleh struktur kekuasaan. Dalam dataran empiris, struktur kekuasaan ini dapat berupa kapital. Artinya, penguasaan struktur kapital dapat dipergunakan secara mudah untuk memengaruhi tumbuh kembang dan benar salahnya suatu pengetahuan. Para elite politik (penguasa) dan elite ekonomi (pengusaha) dengan struktur kapital yang mereka miliki dapat dengan mudah memengaruhi dan mengendalikan proses-proses penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan sosial di universitas maupun di luar universitas sehingga hasil penelitian tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan mereka

Paradigma yang menguasai dan membentuk cara berpikir linear dan biner telah gagal menjelaskan proses produksi pengetahuan kapitalisme sebagai sistem ekonomi yang bersifat universal dan yang dapat diadopsi oleh negara manapun. Deretan panjang diskursus secara bergantian mulai dari modernisasi, pascamodernisasi, pascakolonial memuat tentang metamorfosis kapitalisme dalam berbagai bentuknya. Meski untuk mencapai tujuan itu selalu ditemui bentuk-bentuk campur tangan negara dan kapitalisme global dan hal ini menjadi tantangan dalam ilmu-ilmu sosial di Indonesia. Pada dasarnya neo-liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neo-liberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar.

Pelacakan terhadap kapitalisme di Dunia Ketiga bisa melalui sejarah pembangunan. Ini menjadi angle penting untuk menggambarkan bahwa sebagian negara menolak sistem kapitalisme, dan sebagian lagi menerima sistem kapitalisme. Di antara sikap

menerima dan menolak, terdapat penyesuaian-penyesuaian, di mana konteks sosial, budaya, ekonomi dan politik menjadi pertimbangannya. Bahkan di Jepang, yang sering menjadi contoh keberhasilan pembangunan ekonomi dan *transfer of knowledge* kapitalisme di negara Asia, adalah negara yang bisa merumuskan kembali kapitalisme dengan basis sistem nilai Jepang dan memasukkan variabel *tacit knowledge*.⁹ Pada dasarnya neo-liberalisme adalah sebuah reaksi terhadap membesarnya peran negara yang menyebabkan kehancuran sistem pasar. Jalan keluar yang diusulkan oleh ideologi neo-liberalisme adalah melucuti peran negara dan mengembalikan semua transaksi ekonomi ke dalam hukum pasar.

Frank menunjukkan dengan kekayaan fakta dan sejarah, tiada bahagian di Amerika Latin yang tidak disentuh oleh hubungan pasar. Penarikan ke dalam sistem dunia kapitalis membawa kepada pembangunan di dalam beberapa sektor dan "*development of underdevelopment*" di tempat lain. "*Development of underdevelopment*" berlaku di dalam sistem dunia kapitalis yang dicirikan dengan struktur metropolis-satelit (Frank, 1971). Dalam membincangkan teori ketergantungan, penting sekali teori sistem dunia disentuh. Kerana Wallerstein menjelaskan, sistem sosial perlu dilihat secara menyeluruh, dan negara bangsa di dalam dunia modern tidak relevan jika dikaji secara tersendiri kerana ia bukan satu sistem tertutup. Wallerstein selanjutnya berpendapat bahwa sistem dunia modern adalah sebagai sistem kapitalis. Kerana ia adalah sistem ekonomi. "*Capitalism and a world economy (that is, a single division of labour but multiple polities) are obverse sides of the same coin. One does not cause the other. We are merely defining the same indivisible phenomenon by the different characteristics*" (Wallerstain, 1980).

Beroperasinya sistem kapitalisme di negara-negara Dunia Ketiga disokong oleh peranan intelektual dan universitas. Universitas seringkali menjadi tempat untuk pengembangan pengetahuan-pengetahuan baru untuk kepentingan legitimasi rejim yang berkuasa atau kepentingan state (O'Donnell dan Schmitter, 1986). Kapitalisme sebagai pengetahuan

⁸ Teori Kritis atau Mazhab Frankfurt diartikan oleh Calhoun sebagai proyek teori social yang telah diterima, mengkritik praktik teoretisnya, dan mengkritik analisis substantif kehidupan sosial, tidak hanya tentang aktualisasi, tetapi juga kemungkinannya. (dalam *Habitus, Field and Capital: The Question of Historical Specificity*, in Craig Calhoun, E. LiPuma and M. Postone (eds.). (1993). *Bourdieu: Critical Perspectives*, Chicago, Univ of Chicago Press, h. 61–68).

⁹ Konsep *tacit knowledge* awalnya digunakan oleh Polanyi, kemudian digunakan oleh Nonaka dan Takeuchi. Lihat Ikujiro Nonaka, dan Takeuchi, Hirotaka (1995) *The Knowledge- Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford: Oxford University Press.

diproduksi dan dilegitimasi melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan intelektual akademis di perguruan tinggi tak lebih dari upaya hegemonisasi kapital dan teknologi serta keterbatasan dalam proses indegenisasi pengetahuan yang berasal dari Barat.

Epistemologi kapitalisme Dunia Pertama tidak sama dengan kapitalisme Dunia Ketiga, karena di Dunia Ketiga, kapitalisme mempunyai banyak bentuk sesuai dengan faktor-faktor indegenous di dalam Negara: faktor sosial, kultural, ideologi dan kondisi serta bentuk sistem politik. Kapitalisme dapat ditempatkan sebagai ideologi dan juga sebagai pengetahuan yang masing-masing memiliki fungsi berbeda. Kapitalisme dapat berfungsi sebagai alat mencapai kemajuan, dan juga sekaligus alat menuju keterbelakangan. Dalam konteks demikian ini, relasi kuasa yang tidak setara semakin memperkuat ketergantungan negara-negara kapitalis peripheri kepada negara kapitalis pusat. Bekerjanya sistem kapitalisme Dunia Ketiga atau peripheri atau semiperipheri berjalan bersamaan dan seiring dengan proses penyebaran ideologi modernisasi, developmentalis dan globalisasi, yang tidak lain adalah proses neo-kolonialisme. Revitalisasi kapitalisme sebagai modal produksi terus-menerus dalam proses transformasi. Semenjak itu, dunia akademis mulai mencari rumusan jalan lain untuk membebaskan umat manusia dari keterbelakangan.

Semua ilmu pengetahuan berangkat dari realitas, baik itu realitas empirik maupun realitas non-empirik. Bagi ilmu pengetahuan tertentu, realitas juga merupakan titik akhir tentang hal yang ingin dituju atau dihasilkan, diciptakan oleh ilmu pengetahuan. Hubungan antara realitas, pengalaman, dan ekspresinya seperti disebutkan di atas juga berlaku dalam dunia keilmuan, atau lebih tepatnya dunia ilmu pengetahuan. Namun demikian, bagaimana realitas itu dialami oleh pelaku ilmu pengetahuan, berbeda dengan yang dialami oleh bukan ilmuwan. Termasuk, asumsi-asumsi dasar kapitalisme, dan klaim-klaim kebenarannya yang didukung oleh ilmuwan-ilmuwan prokapitalisme, tampaknya memenangkan kapitalisme tersebut.

Ilmuwan sosial terus mengembangkan alat analisis untuk menilai atau mengkritisi kapitalisme. Kritik-kritik yang dihasilkan berkaitan dengan peranan universitas umumnya dan intelektual atau ilmuwan sosial khususnya. Transformasi tentang penetrasi

ideologi kapitalisme bukan sekadar persoalan teknis, tetapi persoalan nonteknis. Karena dibalik proses transformasi dan penetrasi tidak hanya menyangkut transformasi teknologi inovasi, dan rasionalisasi struktur, melainkan terkait dengan serangkaian proses perekayasaan ilmu sosial untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang diperlukan untuk menghasilkan dan melegitimasi pengetahuan untuk didedikasikan kepada kapitalisme internasional/kapitalisme dunia yang sejatinya adalah rekonstruksi peranan dan relasi kuasa antaraktor-aktor ekonomi politik di Dunia Pertama dan Dunia Ketiga.

Teori tentang Kapitalisme Dunia Ketiga selama ini didominasi oleh pandangan tentang dunia saintifik, dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap bidang epistemologi. Tidak dapat hanya mengatakan bahwa ada westernisasi ilmu-ilmu pengetahuan sampai akhirnya menjadi teori bahkan aksioma. Oleh karena itu, kapitalisme bukan hanya istilah konseptual teoretik yang harus diterima, dipraktikkan, tetapi lebih merupakan *project* konseptual atau substansi yang kehadirannya lebih dikaitkan dengan persoalan epistemologi yang penting untuk dikritisi. Sains sebagai produk sosial sesungguhnya tidak diproduksi melalui mekanisme interaksi dan negosiasi—yang terbentuk dari suatu sistem sosial yang sarat dengan bentukan-bentukan imajinatif (nilai, makna, cara pandang, ideologi, dan kepercayaan). Untuk memahami sains dari dimensi ilmu sosial secara epistemologis itu penting. Karena, sains adalah karya manusia, sebagai spesies yang tidak pernah lepas dari dunia sosial, lingkungan dan pengetahuan ilmiah yang selama ini dipahami sebagai hasil murni kemampuan logika manusia yang lepas dari faktor sosial.

Bagi kaum positivis, objektivitas dalam sains itu ada dan berada di atas segalanya, bersifat objektif, dan untuk kepentingan meyakinkan terhadap kebenaran klaimnya.¹⁰ Foucault membongkar sisi modernitas dari **sisi metodologis**, dan ia pada akhirnya membangun konsep *arkeologi*, *genealogi*, *episteme* dan *kuasa*. Tujuannya adalah menunjukkan kegagalan modernitas yang mengklaim objektivitas dalam pandangan keilmuannya. Foucault dapat menunjukkan terjadinya saling keterkaitan antara kuasa dan pengetahuan secara genealogis dan terstruktur. Dalam kasus kekuasaan kapitalis internasional, fenomena relasi kuasa di antara aktor-

¹⁰ Foucault coba mencari yang lain dengan meneliti serangkaian aturan atau prosedur untuk memperoleh dan menyebarkan kebenaran. Lihat lebih lanjut bahasan Ted Benton dan Ian Craib. (2001). *Philosophy Social Science: The Philosophical Foundation of Social Thought*, NY, Palgrave, khususnya bab 2.

aktor yang mewakili negara, pasar dan *society* membunyikan ada relasi yang rumit dan menyebar yang hadir di mana-mana. Ibaratnya, kekuasaan sebagai sebuah jaringan yang tersebar di mana-mana.

Kapitalisme adalah sebagai formasi sosial yang memiliki hakekat tertentu dan logika histories dan bersifat unik. Logika formasi sosial mengacu pada gerakan-gerakan dan perubahan-perubahan dalam proses-proses kehidupan dan konfigurasi-konfigurasi kelembagaan dari suatu masyarakat.¹¹ Kapitalisme sebagai pengetahuan terus berproses sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan yang terkait dengan relasi kekuasaan. Ilmu pengetahuan dapat semakin dominan dan dianut kebenarannya oleh masyarakat akademik apabila ditopang secara kuat oleh struktur kekuasaan. Universitas mempunyai peranan penting di dalam menempatkan intelektual melawan kekuasaan, tetapi universitas juga dirancang untuk melayani negara bangsa dengan menggunakan teknik pengetahuan dan pemeliharaan, reproduksi budaya nasional.

Pengetahuan dipengaruhi oleh visi dari universitas modern. Kant memberikan ekspresi sebagian dari republik yang membatasi demokrasi dalam diskursus akademik. Michel Foucault menempatkan peranan intelektual khusus secara khusus pula. Intelektual khusus ini, memiliki kuasa untuk menguji sifat khas kekuasaan, termasuk kompetensi untuk mengkritisi pengetahuan yang ada. Karena peran intelektual bukan hanya memberitahu yang lain tentang peran yang harus dilakukannya. Mercado, menunjukkan hubungan antara *science* dan kebijakan pembangunan sebagai cara untuk menjelaskan kategorisasi dunia menjadi dua bagian, sebagai Negara maju dan negara terbelakang, yang terpisah, dan satu sama lain bahkan mempunyai kepentingan yang bersebarangan.

Fenomena ideologisasi pengetahuan terjadi dibalik ideologisasi teknologi. Meski sudah lebih hampir seabad, kajian ilmu-ilmu sosial umumnya, dan sosiologi khususnya menaruh perhatian pada persoalan tentang cara-cara negara-negara Barat membangun dan menciptakan teknologi untuk kemajuan dan kepentingan manusia, untuk merubah keadaan tradisional menjadi keadaan yang modern yang dikenal dengan masyarakat kapitalis,

tetapi masih terbatas kajian yang mempersoalkan kapitalisasi pengetahuan atau teknologisasi pengetahuan bahkan pendalaman atas pembacaan fenomena ideologisasi pengetahuan. Hampir selama separuh abad itu, kajian sosiologi fokus meletakkan perhatian pada bagaimana masyarakat atau negara-negara terbelakang atau yang sedang berkembang bisa mengikuti langkah-langkah menuju masyarakat kapitalis maju, meskipun Dunia Ketiga pada akhirnya tidak berhasil sepenuhnya mengikuti tahap-tahap pemajuan pengetahuan menurut *mode of production* Barat/Dunia Pertama.

Ilmu-ilmu sosial di Dunia Ketiga sejak abad ke-20, dikuasai oleh teori modernisasi yang diklaim bersifat universal. Semenjak itu pula konsentrasi kajian ilmuwan sosial khususnya sebatas pada cara-cara memproduksi pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru yang kemudian disebarluaskan melalui textbook-textbook, hasil-hasil riset yang diasumsikan bisa membantu membebaskan keterbelakangan sebuah negara yang umumnya berada di balahan bumi selatan, dalam diskursus modernisasi dinamakan Dunia Ketiga. Tetapi kenyataannya tidak demikian, karena negara-negara Dunia Ketiga yang diberi preskripsi tentang cara-cara mengatasi keterbelakangan tidak bisa sepenuhnya mencapai kemajuan. Berawal dari situ, beberapa ilmuwan sosial mulai mengalihkan perhatiannya untuk mencari rumusan lain di luar teori-teori modernisasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan.

Mengkritisi kolaborasi antara ilmuwan sosial dengan penguasa tak mengimplikasikan sesuatu yang penting bahwa pentingnya bahwa ilmuwan sosial harus mengumumkan kembali nilai-nilai profesionalnya (otonomi), karena tanpa bisa dielakkan konflik mudah terjadi terkait dengan nilai-nilai pembuat keputusan atau administrator. Gunar Myrdal bicara tentang kontribusi ilmu sosial pada kebijakan sosial dengan menunjuk pada yang mungkin menjadi dilema pada seorang individu ilmuwan sosial, tetapi mungkin bukan sebuah dilema pada sebuah profesi, karena ilmuwan sosial masih memiliki proporsi peran yang menentukan dengan keterlibatannya dalam masalah-masalah yang dihadapi oleh publik (Myrdal, 1953 dalam Ford, 1977).

¹¹ Istilah formasi sosial yang diperkenalkan oleh Karl Marx ini juga dipakai oleh Jurgen Habermas, melalui karyanya *Legitimation Crisis* (1988). Habermas menyebut kapitalisme sebagai salah satu empat formasi sosial (primitif, tradisional, kapitalisme, post-kapitalisme). Pertama, pandangannya tentang peranan semi-periphere dipatahkan oleh pemikiran fungsionalis atau teologis.

Produksi dan Reproduksi Kapitalisme

Perkembangan dunia ilmu-ilmu sosial saat berada dalam iklim pascakolonial dan masyarakat jaringan (*network society*), di mana hubungan antara modal ekonomi dan teknik itu sifatnya tidak tetap, dan cara-cara produksi kapitalis diartikulasikan dengan sebuah cara produksi pembangunan informasi sebagai modal yang diperantarai dengan jaringan kerja elektronik. Hasilnya disebut Castells dengan *informational capitalism* (Myrdal, 1953 dalam Ford, 1977). Globalisasi atau teori-teori yang menjelaskan keterbelakangan atau kegagalan dalam pembangunan menunjukkan, sesungguhnya modernisasi, kapitalisme bukan ideologi yang universal.

Pendekatan keilmuan yang berpusat pada Barat ditanggapi oleh Wallerstein sebagai bagian dari persoalan yang dihadapi ilmuwan yang mempertanyakan indegenisasi ilmu-ilmu sosial itu di Dunia Ketiga. Hal yang utama sebagai sebuah tanggapan Dunia Ketiga, oposisi secara eksplisit pada masuknya model-model yang tidak cocok dengan perkembangan ilmu sosial yang ada dan untuk Dunia Pertama, yang memberikan penekanan pada penemuan inspirasi tersebut (Albrow dan King (eds.), 1990).

Teori-teori yang berpusat pada Barat dalam implemetasinya di Dunia Ketiga tak luput dari dilema. Pembelaan akademis yang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial Dunia Pertama terbukti tidak bisa menyudahi dilema itu, bahkan selalu menjadi diskursus tanpa berkesudahan, dan tidak jarang pula, ilmuwan-ilmuwan sosial Dunia Pertama sebagai pelopor yang memulai untuk mengkritisi relevansi teori-teori tersebut hingga saat ini terus bergelut dalam membangun paradigma-paradigma lain sebagai alternatif untuk menjelaskan realitas empiris yang ada di negara tersebut. Hal ini tak lain sebagai pembongkaran epistemologis pengetahuan Barat dan sekaligus positivisme untuk digantikan dengan epistemologis pengetahuan lain yang dapat mendekatkan upaya untuk mempribumikan teori-teori yang memiliki asal muasal dari Barat (Dunia Pertama) di Dunia Ketiga.

Dunia akademis semenjak itu, mulai mencari rumusan jalan lain untuk membebaskan umat manusia dari keterbelakangan. Para ilmuwan dan intelektual dari disiplin ilmu sosial yang dikenal dengan Mazhab Frankfurt sebagai salah satu pelopor yang mengkritisi berbagai kelemahan dari sistem kapitalisme. Persoalan keterbelakangan, ketertinggalan ekonomi, kemiskinan, dan meningkatnya hutang Dunia Ketiga pada negara-negara Barat industrialis maju (Eropa,

Amerika dan Jepang) bukan disebabkan ilmuwan sosial tidak mampu menerapkan atau mereplikasi teori-teori Barat sesuai dengan konteks Dunia Ketiga, tetapi ada variabel lain yang berpengaruh terhadap keseluruhan proses adopsi teori-teori modernisasi dan sistem kapitalisme Barat itu, seperti variabel sosial kultural, lingkungan dan lainnya.

Ilmuwan-ilmuwan sosial bukannya mengkritisi, tetapi justru menjadi perangkat dari kapitalisme internasional untuk melegitimasi berlakunya sistem kapitalisme itu sebagai kebenaran universal, dan sebagai pengetahuan universal. Bahkan kapitalisme dipahami sebagai ideologi. Dilacak dari sejarahnya, ternyata ilmuwan menjadi peletak dasar ideologi kapitalisme awal dan mereka hidup pada masa transisi dari ekonomi subsisten menuju pada sistem ekonomi pasar, yang mengandalkan pada keuntungan atau laba. Seidman berusaha kembali pada teori sosial yang lebih konsisten dengan lingkaran posmodern dan konsisten dalam ilmu-ilmu sosial secara umum. Karena, teori sosial itu tidak dapat menjadi teori sosial besar (*grand social theory*) seperti Marx dan Durkheim, akan tetapi cukup menjadi 'teori lokal' dan 'etnosentris'. Artinya, tidak ada yang bisa menjadi teori-teori sosial besar, karena para teoretisi sosial melekat dalam keadaan sosial tertentu. Kondisi tersebut mencegah mereka memperoleh semacam sudut pandang yang luas di saat mereka membangun teori-teori besar. Singkatnya, ketika mereka memberanikan diri memproduksi teori besar, para teoretisi sosial dikonstruksi yang menurut Seidman disebut 'mitos'. Beberapa teoretisi telah menciptakan teori-teori besar, misal Karl Marx dan beberapa neoMarxis yang melukiskan perkembangan historis ke arah keselamatan dan kebebasan rakyat dari masyarakat yang tertindas.

Kegagalan replikasi kapitalisme di Dunia Ketiga, persoalannya bukan terletak pada tempat atau lokasi suatu negara yang berada secara geografis di belahan bumi selatan dan secara ekonomi politik masuk dalam area Dunia Ketiga, tetapi karena formasi kapitalisme yang ada selalu dirujuk dengan kapitalisme yang muncul di negara induknya, yaitu Eropa Barat dan Amerika Serikat abad ke-19. Kapitalisme sebagai teori tak luput dari bias yang melekat pada dirinya. Karena kecenderungannya teori memiliki relevansi dan pbenarannya sendiri-sendiri dalam konteks-konteks politik geografis maupun politik ekonomi tertentu, termasuk di Indonesia.

Penjelasan secara kritis mulai banyak dilakukan oleh para ilmuwan sosial dengan cara melacak kembali epistemologi dan ontologi teori tersebut untuk melakukan konstruksi teori baru sekaligus

sebagai penyelesaian krisis dalam teori-teori Kapitalisme Dunia Ketiga. Muatan-muatan regional dan internasional diganti dengan muatan lokal, sehingga pembacaan fenomena kapitalisme di Dunia Ketiga penting untuk menyertakan peranan ilmuwan-ilmuwan sosial guna membangun konsep/teori tentang kapitalisme, yang tidak lagi memadai hanya dibaca sebagai bentuk hegemoni peradaban Barat, neokolonialisasi atau kapitalisme global, globalisasi atau neoliberalisme.

Teoretisi ilmu sosial telah mengembangkan perangkat yang bisa menjembatani kesenjangan dan kekosongan alat analisis untuk mengembangkan, dan mengimplementasikan serta memproduksi reproduksi kebijakan negara semiperipheri dalam struktur historis kapitalis pusat ke negara peripheri di Asia.¹² Karena pengetahuan kapitalisme sebagai teori produk Dunia Pertama. Penyebaran pengetahuan kapitalisme yang melampaui batas-batas geografis, melewati ruang dan waktu bukan pengetahuan yang bebas nilai. Meski telah banyak alat uji untuk mengukur kesahihan kapitalisme melalui metode positivis sebagai teori yang universal, tetapi kapitalisme masih menyisakan keraguan atas sifat universalnya. Dalam proses perkembangan sejarahnya, sampai kini pengetahuan itu sudah melebar menjadi kapitalisme internasional.

Kapitalisme internasional dan teori Kapitalisme Negara di Dunia Ketiga berdasar kritik terhadap teori Kapitalisme secara umum. Kritik itu menjadi titik tolak untuk eksplorasi teori lebih lanjut atas relevansinya dengan perkembangan fenomena mutakhir saat ini. Persoalan muncul tidak hanya terkait dengan produksi atau ekspansi kapitalisme di tingkat antarnegara atau kawasan, tetapi sudah masuk ke tingkatan lokal, dan nasional. Kapitalisme bahkan diklaim telah menjadi pandangan hidup universal seluruh bangsa manusia. Pendekatan lain seringkali dianggap telah menemui jalan buntu dan akhir sejarahnya.

Di dalam sistem kapitalisme peripheri, peranan negara besar untuk mengelola relasi kuasa dengan Dunia Pertama sebagai agen yang memproduksi terus menerus kapitalisme. Antonio Gramsci dengan teori Hegemoni yang tak lain adalah sebuah strategi kekuasaan yang bekerja melalui mekanisme

kekuasaan, karena dalam pengertian Gramscian, tatanan dunia pascaperang yang memunculkan gagasan pembangunan yang sangat *hegemonic* (Petras, 2003). Hal ini merujuk pada situasi subordinasi di tingkat individu maupun masyarakat. Subordinasi merupakan sebuah relasi dominasi di mana subyek dalam posisi lemah dari kebebasan atau memiliki otonomi sebagai peseorangan maupun sebagai warganegara. Tidak ada ruang yang tersisa yang bisa diurus sendiri warga masyarakat (*civil society*) (Urbinati, 1998). Kekuatan hegemoni kuasa negara menimbulkan persoalan baru, terkait dengan persoalan struktural seperti kemiskinan, terbatasnya ekspresi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, telah bertransformasi menjadi ideologi yang menuntun kerja-kerja aparat negara (*state actors*) sebagai pelaku dan pelindung dari bekerjanya sistem kapitalisme. Implikasinya, sistem politik Dunia Ketiga didominasi oleh apparatus negara yang represif, dalam pandangan Althusser disebut sebagai *repressive state apparatus* yang berfungsi dengan menerapkan cara-cara kekerasan dan represi.

Gambaran secara umum proses transformasi kapitalisme pada era pasca-Perang Dingin tidak lagi mendudukkan ideologi politik sebagai basis untuk melakukan ekspansi untuk mencari pengaruh kekuasaan ke negara-negara lain, yang notabene adalah negara-negara bekas koloni dari *core capitalist* yang berada di benua Asia dan Afrika serta Amerika Latin, tetapi ekspansi itu berganti ideologi dengan menempatkan kapitalis sebagai ideologi tandingan untuk mengakhiri perang ideologi politik. Kapitalisme tidak hanya menjadi sistem ideologi, melainkan sistem pengetahuan yang didukung oleh kerja-kerja intelektual universitas juga (Dant, 1991). Proses transformasi ideologi menimbulkan berbagai interpretasi yang berakhir pada sikap pro kontra terhadap ideologi kapitalisme itu.

Replikasi kapitalisme di Dunia Ketiga sebagai bagian dari kegiatan westernisasi ilmu-ilmu sosial telah mengangkat keraguan dan dugaan ke tahap metodologi ilmiah. Bukan hanya itu, Westernisasi ilmu juga telah menjadikan keraguan sebagai alat epistemologi yang sah dalam keilmuan. Menurutnnya lagi, Westernisasi ilmu tidak dibangun di atas wahyu dan kepercayaan agama, tetapi dibangun di atas

¹² Konsep kapitalis pinggiran untuk menyebut tipe kapitalisme yang ada di kawasan Dunia Ketiga khususnya Asia Timur (minus Jepang), dan Amerika Latin, karena dunia ini dengan sengaja dibagi secara dikotomis oleh ilmuwan-ilmuwan sosial Barat untuk memudahkan penetrasinya di negara lain. Tetapi dalam konsepsi Wallerstein dapat diinterpretasi adanya sistematika kapitalisme terdiri dari tiga lapisan, yaitu: *core*, *semiperipheri* dan *peripheri* di mana *semiperipheri* countries menjadi penyangga *core*, dan *peripheri* menjadi penyangga *semiperipheri*. Indonesia dapat ditempatkan sebagai negara *periphery* menurut kategori ini. Lihat lebih lanjut Fran Tonkiss. (2006). *Contemporary Economic Sociology: Globalization, Production, Inequality*, NY, Routledge.

tradisi budaya yang diperkuat dengan spekulasi filosofis yang terkait dengan kehidupan sekular yang memusatkan manusia sebagai makhluk rasional. Akibatnya, ilmu pengetahuan dan nilai-nilai etika dan moral, yang diatur oleh rasio manusia, terus-menerus berubah. Ilmu-ilmu sosial mengalami proses universalitas (istilah yang relevan mungkin adalah Westernisasi ilmu) yang dilegitimasi bisa memperkecil keraguan dalam merumuskan kebenaran melalui seperangkat metodologi ilmiah positivis (rasional, empiris, obyektif, universal). Selain itu, dalam proses universalisasi ilmu-ilmu sosial muncul keraguan itu yang akhirnya menjadi senjata untuk mencari rumusan metodologi lain yang ini berarti epistemologi keilmuan Barat mendesak untuk dikritisi secara terus-menerus.

Kesepakatan dunia yang didukung oleh ilmuwan-ilmuwan menerima kebenaran kapitalisme sebagai sistem dunia memiliki hierarki yang khusus menyangkut kekuasaan sosial dan kepentingan politik. Tetapi fakta bahwa kapitalisme telah berkembang dalam kerangka kerja kelembagaan yang berskala dunia.¹³

Kapitalisme dan Legitimasi Akademik

Pengkajian teori kapitalisme adalah upaya membongkar perdebatan teoretik yang kecenderungannya berkisar pada persoalan tentang sistem kapitalisme yang diterapkan di negara Dunia Ketiga tidak menghasilkan perubahan ekonomi, sosial, dan politik secara signifikan, baik menggunakan indikator kualitatif maupun kuantitatif. Negara-negara di Dunia Ketiga tidak berhasil dalam menjalankan sistem kapitalisme sesuai jalurnya. Sehingga peneliti, intelektual, dan juga praktisi mencoba mencari penjelasan dari kegagalan itu.

Analisis yang dilakukan oleh intelektual, peneliti ilmu-ilmu sosial, dan ekonomi politik umumnya berpijak pada cara berpikir struktural (Marxis/neomarxis), yaitu cara melihat kegagalan bukan disebabkan oleh substansi kapitalisme, tetapi disebabkan oleh sifat internal di negara tersebut. Kajian-kajian tersebut, pada akhirnya melahirkan teori-teori sosial, dan sosiologi, serta teori-teori ekonomi politik. Hal ini bisa dilacak dari berbagai

varian teoretik yang menjadi paradigma untuk menjelaskan kegagalan sistem kapitalisme di Dunia Ketiga.

Sederetan teori-teori yang muncul seperti teori Modernisasi, teori Ketergantungan, teori Sistem Dunia, teori Kapitalisme Negara, adalah teori-teori yang merupakan produk masa Perang Dingin. Teori-teori itu lahir dalam konteks Perang Dingin yang tanpa disadari sebagai teori yang berpijak pada analisis bipolar. Artinya, faktor ideologi menjadi titik tumpu untuk menjelaskan realitas yang ada, dan hal ini jelas mengandung bias secara keilmuan. Ideologi Barat versus ideologi Timur, atau ideologi Komunis versus ideologi Kapitalis berpengaruh signifikan dalam lahirnya teori-teori kapitalisme itu.

Perkembangan lanjut kapitalisme juga bisa dilacak dari perkembangan teori-teori sosial atau teori-teori sosiologi mutakhir yang merupakan produk dari pasca-Perang Dingin, yang tidak bebas nilai. Teori-teori itu kecenderungannya mengambil jalan tengah, bersifat abu-abu, dan tidak dikotomik, tidak bersifat biner (bipolar), dan akhirnya tidak bebas nilai juga. Ada keberpihakan kepada pihak-pihak tertentu. Giddens dengan 'Third Way', Petras dengan pembelaannya terhadap buruh atau kelas pekerja, dan menawarkan praksis gerakan dalam menentang neoliberalisme.

Analisis mereka pada umumnya berada di benua Amerika Latin, yang memiliki konteks sosi historis dan kultural yang berbeda karakteristiknya dengan negara-negara Dunia ketiga umumnya. Kegagalan teori-teori kapitalisme di Amerika Latin bukan berarti kegagalan dari kapitalisme an sich, tetapi ada variabel lain yang belum terungkap secara eksplisit dalam analisis tersebut. Negara-negara Dunia Ketiga bukan Amerika Latin, negara-negara Dunia Ketiga bukan Asia Timur saja, negara-negara Dunia Ketiga juga tidak selalu cocok dengan sosialisme, negara-negara Dunia Ketiga tidak selalu cocok dengan kapitalisme dalam berbagai variannya. Artinya, negara-negara Dunia Ketiga itu unik, memiliki konteks sosio historis yang berbeda dengan negara yang berada di belahan Utara, apalagi Barat. Keunikan yang lain, Dunia Ketiga itu adalah Dunia Timur, yang memiliki sejarah kolonialisme yang juga unik. Karena itu dalam bagian ini disajikan pemetaan

¹³ Asumsi dari kaum Marxian: kapitalisme tanpa bisa dielakkan bertujuan mencapai pembangunan ekonomi pasar dan demokrasi politik. Ini sulit dibuktikan di Dunia Ketiga. Karena selalu ada *mode of production of knowledge* untuk mencapai demokrasi, artinya ada cara produksi pengetahuan yang dibuat oleh kelas penguasa untuk membangun sistem demokrasi ala negara tersebut. Hal ini seringkali disebut dengan bangunan sistem demokrasi prosedural karena struktur-struktur demokrasi ada, tetapi sistem yang berjalan di dalamnya adalah mekanisme hubungan *state-civil society* yang berciri praktik-praktik kekuasaan yang bersifat otoritarian atau represi.

teori yang dipandang menjadi sangat penting dalam upaya merumuskan teori alternatif dalam menjelaskan realitas sosiologis transportasi publik, dan merumuskan teori kapitalisme yang berpijak pada fakta historis sebuah negara poskolonial.

Kondisi tersebut mengundang gerakan di berbagai bidang. Dalam literatur sosiologi dan ekonomi politik, penerapan sistem kapitalisme dalam pembangunan di Amerika Latin telah melahirkan pemikir-pemikir baru di bidang sosiologi dan ekonomi politik. Misalnya Andre Gunder Frank dan Fernando H. Cardoso. Dengan menggunakan pendekatan neomarksis, mereka melahirkan teori dependensi (ketergantungan) dalam memandang keberadaan negara-negara Dunia Ketiga. Selama ini, modernisasi di negara-negara Amerika Latin dan negara Dunia Ketiga lainnya justru melahirkan para penguasa mapan, pemilik modal besar, tuan tanah, dan kaum elite yang mengeksploitasi rakyat. Bantuan negara maju dalam proses modernisasi yang justru membuat Dunia Ketiga begitu bergantung pada negara maju, juga memberi andil besar dalam memiskinkan rakyat Dunia Ketiga. Maka para penganut teori dependensi berpendapat, untuk mengakhiri kekuasaan para elite yang mapan, juga dominasi negara maju, dibutuhkan revolusi sosialis. Dalam kaitannya dengan pembangunan ekonomi, mereka beranggapan, diperlukan penjungkirbalikan struktur ekonomi, politik, dan sosial dengan meminjam pendekatan marksis. Pada akhirnya sistem kapitalisme sebagai model modernisasi.

Pengetahuan merupakan sesuatu yang eksplisit sekaligus tacit, beberapa pengetahuan dapat dituliskan di kertas, diformulasikan dalam bentuk kalimat-kalimat, atau diekspresikan dalam bentuk gambar. Namun, ada pula pengetahuan yang terkait erat dengan perasaan, keterampilan dan bentuk bahasa utuh, persepsi pribadi, pengalaman fisik, petunjuk praktis dan intuisi, di mana pengetahuan terbatinkan seperti itu sulit sekali digambarkan kepada orang lain. Penciptaan pengetahuan secara efektif tergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut yaitu konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan pengetahuan yang dimunculkan oleh hubungan-hubungan bersama. Dalam konteks organisasi, bisa berupa fisik, maya, mental atau ketiganya. Misalnya kegiatan riset menurut Cole terkandung sekaligus ketiga aspek yang menyangkut isi kognitif dari ilmu pengetahuan, yakni *foci of attention*, tingkat perkembangan, dan isi intelektual. Tingkat perkembangan dari masing-masing bidang penelitian tentunya berbeda (Stephen, 1992).

Teknologi adalah bagian dari pengetahuan manusia dan mulai memasuki inti dimensi manusia itu sendiri. Dialektika antara ketiga hal ini (Pengetahuan-Ilmu-Kebenaran) sedikit banyak terlahir pada masyarakat-negara berbasis industri maju yang memang mampu mengakses dan memproduksi pengetahuan dalam kekuatan yang gemilang. Namun bagi konteks negara-negara berkembang yang masih berkuat dalam persoalan perut dan kekuasaan feodal, khususnya Indonesia, dialektika antar tiga hal ini sangat terbatas dan hanya dimiliki oleh manusia-manusia Indonesia yang bergerak di tingkatan pinggiran yang pusatnya ada di Uni Eropa. Kesenjangan dialektika ini setidaknya telah memunculkan gerakan-gerakan mendasar yang mencoba mencari cara untuk merebut posisi pengetahuan untuk menjadi seimbang.

Posisi Universitas dan Legitimasi Kapitalisme

Proses perkembangan sejarah keilmuan yang ditengarai dari peristiwa Abad Kegelapan tak bisa dipisahkan dari proses kelahiran kapitalisme an sich. Di dunia asalnya, kapitalisme bukan sesuatu yang ahistoris. Karenanya, ketika sistem kapitalisme disebarluaskan sebagai sesuatu yang bisa membebaskan manusia dari masa kegelapan, tidak memperoleh hasil yang sama. Kapitalisme tidak bisa membebaskan keterbelakangan di Dunia Ketiga. Kapitalisme di Dunia Ketiga bukan sesuatu yang ahistoris. Singkat kata, abad Pertengahan bisa dianggap mewakili corak baru bentuk-bentuk eksploitasi tersebut dalam wujud imperialisme dan kolonialisme.

Pada negara-bangsa modern, universitas mewakili paradigma epistemologi pengetahuan yang memiliki karakteristik utama yaitu otonomi. Pokok yang mendasari hal ini adalah sebuah model konsensus tatanan sosial politik. Universitas mencatat sejarah pertama yang penting dalam menentang secara radikal demokrasi untuk warga negara. Dengan basis disiplin pengetahuan yang terus-menerus dikembangkan akhirnya universitas berhasil dalam menghantarkan masyarakat ke tahap industri. Awal tahun 1970, universitas telah mencakup etos demokrasi warga negara sebagai pendampingan yang kuat secara sipil, politik, dan hak asasi manusia di dalam gerakan untuk demokrasi sosialis maupun feminisme.

Meski universitas mempunyai peranan penting di dalam menempatkan intelektual melawan kekuasaan, tetapi universitas juga dirancang untuk melayani

negara-bangsa dengan menggunakan teknik pengetahuan dan pemeliharaan, termasuk reproduksi budaya nasional. Pengetahuan dipengaruhi oleh visi dari universitas modern. Kant memberikan ekspresi sebagian dari republik yang membatasi demokrasi dalam diskursus akademik. Kant memasukan bentuk universitas yang dapat mengacaukan fungsi dari masyarakat, di mana basis publik dilembagakan oleh universitas dan kemudian universitas menjadi politis. Pengetahuan, akhirnya berada di universitas, dan tidak berada di dalam masyarakat, seperti Polis—konsepsi Plato tentang negara kota (Delanty, 2001).

Eksistensi universitas di Dunia Ketiga penting sekali untuk menjelaskan tentang preskripsi teori modernisasi sebagai cara untuk mengatasi keterbelakangan tidak sepenuhnya berhasil. Beberapa ilmuwan sosial, akhirnya mulai mengalihkan perhatiannya untuk mencari rumusan lain di luar teori-teori modernisasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan. Teori-teori modernisasi dan seluruh perangkat sistem ekonomi politik yang dibangun dalam kesatuan konsep kapitalisme mulai dipertanyakan, disangsikan sifat universalnya. Karena realitas pembangunan di Dunia Ketiga yang sudah mengadopsi sistem kapitalisme tidak menyebabkan adanya peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, perkembangan industri atau bahkan demokrasi. Tetapi justru yang muncul adalah keterbelakangan, ketergantungan pada negara-negara Barat penganjur modernisasi dan sistem kapitalisme.

Dalam pandangan Foucault, ada suatu perbedaan nyata antara produksi pengetahuan yang berasal dari sebuah diskursus ekonomi dan pemahaman epistemologi tradisional. Apabila menempatkan semua pengetahuan sebagai kekuasaan, maka ini berhubungan dengan sebuah pemahaman epistemology. Artinya, seseorang dapat mengetahui sesuatu yang dikontrol oleh kekuasaan (Foucault, 1969). Ini bisa dimungkinkan karena pengetahuan memiliki objek, yang menyangkut tentang apa yang diketahui, dan yang lainnya sebagai orang yang menerima pengetahuan sebagai kebenaran. Tanpa disadari, kapitalisme memiliki banyak ragam di Dunia Ketiga, ada replika-replika kapitalisme, baik di Asia maupun Amerika Latin. Bisa dipastikan setiap negara yang mengadopsi kapitalisme, ditemukan keunikan di dalamnya. Keunikan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor lokal, internal dan eksternal. Kapitalisme tidak pernah menyerupai bentuk aslinya. Proses replikasi sebagai sebuah proses sosial, ekonomi dan politik melibatkan peranan aktor-aktor universitas, lembaga swadaya masyarakat, dan elite-elite ekonomi politik dan pemerintah termasuk birokrasi.

Meski ada klaim-klaim universalitas dari sistem kapitalisme, tetapi klaim-klaim itu sebagai bagian dari upaya-upaya pembenaran dalam implememtasi metodologi positivis ilmiah yang mendukung kerja-kerja intelektual/ilmuwan sosial. Dibalik klaim Dunia Pertama tentang universalitas kapitalisme, ada sesuatu yang tersembunyi, yaitu kapitalisme berkembang searah dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kapitalisme adalah produk masa pencerahan, yang menempatkan rasio di atas segalanya, kapitalisme sebagai kebenaran tunggal. Artinya, perkembangan kapitalisme sebagai sebuah sistem pengetahuan terus diproduksi oleh ilmuwan-ilmuwan Dunia Pertama yang terus-menerus mencari penjelasan atas peristiwa di masa sebelumnya, yaitu jaman Kegelapan (abad pertengahan). Pada masa itu, klaim-klaim kebenaran disusun atas dasar pemilik otoritas keilmuan, tidak lagi disusun oleh pemilik otoritas metafisik (namanya apa). Seiring dengan upaya untuk membangun otoritas, dan mencari kebenaran atau pembebasan atas masa kegelapan yang telah menghancurkan sebagian peradaban manusia, maka para ilmuwan tanpa henti terus membangun pengetahuan untuk menjadi ilmu pengetahuan dan memperoleh status sebagai kebenaran (Weber dalam Roth dan Wittich (eds.), (1978).

Sistem kapitalisme sebagai sebuah sistem pengetahuan. Beroperasinya sistem kapitalisme di negara-negara Dunia Ketiga tak terlepas dari pengaruh peranan intelektual dan universitas. Universitas seringkali menjadi tempat untuk pengembangan pengetahuan-pengetahuan baru untuk kepentingan legitimasi rezim yang berkuasa atau kepentingan *state*. Dengan demikian, seperti dikatakan Philpott, daripada menguji kesesuaian gagasan tertentu dengan realitas empiris Indonesia, ia lebih tertarik untuk mengangkat isu-isu epistemologis dan ontologis yaitu cara pengetahuan diperoleh, relasi kekuasaan di baliknya, dan keberadaan pengetahuan itu sendiri yang berdasarkan pengetahuan itu Indonesia diimajinasikan, dan dikonstruksi.

James Petras dan Veltmeyer (2001) berhasil membongkar topeng globalisasi. Dalam temuannya dijelaskan bahwa globalisasi sebagai sebuah wacana yang dijadikan oleh aktor-aktor kapital global sebagai alat untuk memberikan payung bagi pergerakan dan penyebaran ideologi kapitalisme ke seluruh penjuru dunia. Dan melalui wacana globalisasi, ditumbuhkan mitos-mitos pembangunan, modernisasi, dan industrialisasi (Petras dan Veltmeyer, 2001). Keyakinan bahwa globalisasi adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari karena timbul dari proses-proses alamiah, dan wacana globalisasi

merupakan sebuah rancangan global yang dibuat untuk menyatukan bangsa-bangsa di dunia di bawah panji-panji kapitalisme global.

Habermas berargumentasi, teknologi telah menjadi ideologi yang bekerja memasuki semua sisi kehidupan masyarakat teknokratis, sehingga menimbulkan kecenderungan fetisisme ilmu dalam masyarakat kontemporer sebagai akibat bergesernya ilmu menjadi satu bentuk ideologi baru. Kesimpulan ini penting dilihat sebagai sebuah kritik yang jauh lebih optimistis dibanding para peletak dasar teori kritis mahzab Frankfurt lainnya. Bagi Habermas, munculnya ilmu dan teknologi sebagai kekuatan pemberi legitimasi baru bukan hanya menandai transformasi dari bentuk-bentuk ideologi tradisional menjadi sebuah ideologi yang modern dan rasional, melainkan juga sebagai tanda mulai munculnya kritik ideologi (Dant, 1991).

Dalam pembuatan kebijakan publik yang merupakan aplikasi dari *knowledge capitalism*, ada eksklusi politik. Karena tidak semua orang bisa dilibatkan di dalam proses pembuatan kebijakan sosial itu, sekalipun negara itu mempraktikkan prinsip-prinsip demokrasi. Sebagai gambaran, adalah replikasi kebijakan Bus Rapid Transit di Indonesia (di Jakarta disebut TransJakarta busway) yang telah diklaim sebagai pilihan kebijakan untuk mengatasi persoalan kemacetan Jakarta. Kebijakan BRT ini merupakan salah satu bukti bahwa BRT adalah manifestasi sistem pengetahuan kapitalisme yang tiada lain adalah *knowledge economy* yang memuat relasi kuasa yang rumit antara aktor-aktor yang mewakili negara, *society* dan pasar. Amerika Serikat sebagai negara imperial tidak secara langsung menyebarkan project BRT ke Indonesia, tetapi lewat jalur Amerika Latin, khususnya Bogota dan bukan mereplikasi keberhasilan Curitiba (meski sebagai negara Amerika Latin juga). Bagi negara Korea Selatan, replikasi BRT berorientasi kepada keberhasilan Curitiba. Begitu halnya Cina, menerapkan BRT dengan sistem mixed, artinya mereplikasi keberhasilan Bogota dan Curitiba.

Ini membuktikan telah bekerjanya jaringan penyebaran teknologi melalui teknologi kapitalisme. Di dalam jaringan terdapat hubungan kekuasaan yang bersifat dinamis, ada pihak yang berkonflik, beraliansi maupun yang tidak masuk dalam kategori

keduanya. Ada pergulatan untuk masuk menjadi warga yang memiliki aspirasi, kepentingan dan pengetahuan sehingga menuntut hak-haknya sebagai warga negara untuk bersuara, terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (inklusi), dan ada warga sebagai kelompok yang berkepentingan untuk memfasilitasi beroperasinya kerja-kerja dan produksi kapitalisme dan kelompok yang tidak tahu hak-haknya sebagai warga negara sehingga tidak menuntut apa pun, dan di sinilah sebagai awal dari terjadinya pemisahan atau eksklusi.

Kapitalisme sebagai sebuah sistem global telah mengalami krisis yang parah karena munculnya apa yang disebut Karl Popper sebagai masyarakat terbuka. Berpijak pada teori Karl Popper, Soros mengatakan bahwa kapitalisme saat ini telah membahayakan masyarakat terbuka dan ini awal dari kritiknya terhadap sistem kapitalisme (Soros, 2000). Sistem kapitalisme, dalam pandangan Francis Fukuyama merupakan akhir dari sejarah¹⁴ yang artinya tidak ada lagi sistem yang menggantikannya.¹⁵

Kapitalisme memang tidak berkembang dalam waktu bersamaan, tetapi dengan cara yang sama kapitalisme dikembangkan di semua bagian dunia, dan siklus ekonomi juga tidak terjadi dengan mulus dan lancar di semua bagian ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Dominasi ekonomi melalui sistem perekonomian dunia versi Bank Dunia, IMF dan segelintir institusi ekonomi tersohor dunia lainnya, ternyata telah memperlebar jurang antara kelompok negara-negara miskin dengan kelompok kecil negara-negara kaya. Sistem kapitalis dibangun selama 500 tahun dan berhasil eksis di seluruh penjuru dunia, karena itu menjadi mudah menemukan berbagai paradigma baru untuk mengkritisi sistem kapitalisme itu, karena akibat hegemoni sistem tersebut, peranan negara dalam membela kepentingan umum patut disangsikan (Bowles, Edwards and Roosevelt, 2005).

Kapitalisme global telah meningkatkan kemiskinan dan ketidakadilan sosial, tidak hanya dengan mengubah hubungan antara modal dan tenaga kerja, tetapi juga melalui proses peminggiran sosial yang merupakan suatu konsekuensi langsung struktur jaringan ekonomi baru. Aliran modal dan informasi telah menghubungkan-hubungkan jaringan-jaringan dunia, dan kapitalis global mengesampingkan segala

¹⁴ Francis Fukuyama dalam buku *The End of History* memperlihatkan kapitalisme sebagai pemenang dalam pertarungan ideologi ekonomi politik.

¹⁵ Pandangan Fukuyama, seperti apa yang dikemukakan Berger bahwa kapitalisme menjadi masa depan dunia. Kemudian hal ini dibantah oleh Giddens dan James Petras dalam tulisannya akhirnya menyanggah Giddens tentang the Third World.

populasi dan wilayah yang tidak memiliki nilai atau penarik bagi pencarian sumber keuangan dari jaringan (Capra, 2003).

Penutup

Berakhimya era kolonialisme, dunia memasuki era 'neokolonialisme,' di mana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik, dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan pengetahuan serta ideologi. Pada era ini, dominasi negara-negara bekas penjajah terhadap bekas koloni mereka tetap dilanggengkan melalui kontrol terhadap teori, ilmu pengetahuan, dan juga proses perubahan sosial.

Dalam kondisi pascakolonial dan kapitalisme lanjut, kritisisme pengetahuan yang diproduksi Barat melalui kerja-kerja ilmuwan sosial sudah saatnya diganti dengan idegenisasi pengetahuan yang memasukkan faktor-faktor internal masyarakat/negara. Foucault mempertimbangkan semua pengetahuan arbiter, termasuk penyebutan kebenaran, untuk mempertahankan hubungan dan fungsi struktur kekuasaan. Ada masalah dengan konsepsi Foucault, jika salah memahami hubungan antara pengetahuan dan kekuasaan saat mengasumsikan bahwa banyak pengetahuan yang cocok bagi kekuasaan yang mungkin disebut hanya sebagai pengetahuan yang benar-benar salah. Apa yang dipertanyakan dari pengetahuan atau apa yang ditemukan dalam pengetahuan memungkinkan munculnya harapan pada pemilik otoritas untuk mengatakan bahwa produksi pengetahuan baru menjadi satu atau bergabung dengan korporasi, disiplin dan kekuasaan administrasi.

Secara epistemologis, kapitalisme Dunia Pertama tidak sama dengan kapitalisme Dunia Ketiga, karena di Dunia Ketiga kapitalisme mempunyai wajah ganda, di satu sisi sebagai alat mencapai kemajuan sekaligus keterbelakangan. Kapitalisme Dunia ketiga berjalan bersamaan dengan proses penyebaran ideologi modernisasi, developmentalis dan globalisasi, yang identik dengan proses neokolonialisme.¹⁶

Steven Seidman, Charles Lemert dan Foucault yang bukan sosiolog, tetapi mereka mencoba membangun teori sosial interdisipliner. Dalam beberapa hal, kajian mereka menjadi semacam teori Sosiologi. Yang penting bagi sosiolog adalah dapat mengkritisi secara menyeluruh terhadap premis

dasar teori, dan dalam kasus yang sama, yang penting bahwa teoretisi sosiologi dan para pengkaji bidang teori sosiologi setidaknya menekuni dengan ide-ide postmodern atau kondisi empiris yang kini berlangsung. Ide-ide tersebut dapat membimbing ke dalam diskursus sosiologis, dan mereka sama sekali mengubah hakikat diskursus sosiologis.

Ilmuwan-ilmuwan sosial di Dunia Ketiga dan sosiolog Indonesia tidak harus mengikuti ilmuwan dunia Pertama/Barat. Sudah saatnya untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan Said, Spivak maupun Hommi Bhabha untuk menolak tiga bentuk penjajahan, yaitu: pemikiran akibat logosentrisme, penjajahan politik dan penjajahan ekonomi akibat kolonialisme. Dengan kata lain, perlu memilahkan gaya berpikir berdasar epistemologi dan ontologi antara Timur dan Barat. Kesimpulannya adalah salah satu implikasi dari produksi baru pengetahuan pada akhirnya adalah poin tentang akhir pengetahuan (*the end of knowledge*). Universitas adalah tempat istimewa pengetahuan yang diterima sebagai legislasi masyarakat modern oleh intelektual dengan kategori kebenaran, moralitas, kemanusiaan dan alasan yang didefinisikan bidang pengetahuan.

Semua ilmu pengetahuan berangkat dari realitas, baik itu realitas empirik maupun realitas non-empirik. Bagi ilmu pengetahuan tertentu, realitas juga merupakan titik akhir tentang hal yang ingin dituju atau dihasilkan, diciptakan oleh ilmu pengetahuan. Hubungan antara realitas, pengalaman, dan ekspresinya seperti disebutkan di atas juga berlaku dalam dunia keilmuan, atau lebih tepatnya dunia ilmu pengetahuan. Namun demikian, bagaimana realitas itu dialami oleh pelaku ilmu pengetahuan jelas berbeda dengan yang dialami oleh bukan ilmuwan. Sains adalah sebagai produk sosial. Sains tidak diproduksi melalui mekanisme interaksi dan negosiasi yang terbentuk dari suatu sistem sosial yang sarat dengan bentukan-bentukan imajinatif, seperti nilai, makna, cara pandang, ideologi, dan kepercayaan.

Setiap masyarakat dan setiap zaman memiliki bentuk-bentuk wacananya sendiri yang di dalamnya kebenaran-kebenaran itu dibangun. Kebenaran adalah capaian sistem-sistem pengetahuan yang menguasai tatanan sosial yang berisi teknik-teknik, prosedur-prosedur nilai, tipe-tipe wacana, dan teknologi yang dikembangkan.

¹⁶ Revitalisasi kapitalisme sebagai moda produksi terus menerus dalam proses transformasi.

Masa depan perkembangan dan kegunaan teori-teori sosial bergantung pada cara ilmuwan-ilmuwan sosial dalam memproduksi pengetahuan. Ilmuwan sosial yang tidak lagi harus berpijak pada narasi besar, positivistik, mengutamakan universalitas, objektivitas, melainkan memasukkan dimensi lokal, narasi-narasi kecil, partikularistik, subjektif dan nonpositivistik. Sebagaimana yang telah dilakukan teoretisi poskolonial, dengan mengkritisi ilmu-ilmu sosial ternyata terungkap bahwa yang terdapat di dalam teori itu tak lain adalah kolonialisme itu sendiri. Dimensi-dimensi kolonialisme Barat terbukti memengaruhi dinamika ilmu-ilmu sosial Dunia Ketiga. Persoalan yang patut dipikirkan adalah apakah bisa menyudahi dan menemukan paradigma yang sepenuhnya dapat menjelaskan tentang formasi kapitalisme (dan juga neoliberalisme) dalam berbagai konstruksinya.

Produksi pengetahuan yang berbasis pada kondisi internal masyarakat/negara ternyata memberikan kontribusi signifikan pada pembaruan pengetahuan dan teknologi, daripada terus-menerus menerima atau mengadopsi pengetahuan tanpa basis pengetahuan internal (sebagai bagian dari proses indegenisasi) yang ada di dalam masyarakat/negara.

Daftar Pustaka

- Albrow, Martin & Elizabeth King (eds.) (1990) *Globalization, Knowledge and Society*. London: Sage Pub.
- Amin, Samir. (1976) *Unequal Development*. New York: Monthly Review Press.
- Benton, Ted & Ian Craib. (2001) *Philosophy Social Sciences: The Philosophical Foundation of Social Thought*, NY: PALGRAVE.
- Bowles, S., Edwards, R. & Frank Roosevelt. (2005) *Understanding Capitalism: Competition, Command*, edisi ketiga, Madison Avenue, NY: Oxford Univ. Press.
- Capra, Fritjof. (2003) *The Hiddens Connections: A Science for Sustainable Living*, London: Flamingo.
- Cole, Stephen. (1992) *Making Science: Between Nature and Society*. Cambridge, Mass: Harvard University Press.
- Dant, Tim. (1991) "Knowledge, Ideology and Discourse, A Sociological Perspective", NY: Routledge.
- Delanty, Gerard. (2001) *Challenging Knowledge: The University in the Knowledge Society*, UK, Buckingham: SRHE and Open University.
- Ford, Thomas R. (1977) The Production of Social Knowledge for Public Use, *Social Forces*, Vol. 56, No. 2, Special Issue. (Dec.) h. 504–518, University of North Carolina Press.
- Foucault, Michel. (1972) *The Archaeology of Knowledge*, London: Tavistock.
- Foucault, Michel. (2003) *Society Must Be Defended*. USA: St. Martin's Press.
- Foucault, Michel. (1980) *Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972–1977*, Colin Gordon (ed.) Brighton NY: Harvester Press.
- Frank, Andre Gunder. (1971) *Capitalism and Underdevelopment in Latin America*, Harmondsworth, Penguin.
- Fukuyama, Francis. (1993) *The End of History and the Last Man*, New York: Avon.
- Giddens, Anthony. (1990) *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity Press.
- Habermas, Jurgen. (1988) *Legitimation Crisis*. London: Heinemann.
- Hoogvelt, Ankie. (1997) *Globalisation and the Postcolonial World, the New Political Economy of Development*. London: MacMillan Press.
- Immanuel Wallerstein. (2004) *The Uncertainties of Knowledge*, Philadelphia, Temple Univ.Press.
- Marcuse, H. (1964) *One Dimensional Man*. Boston: Beacon Press.
- Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka. (1995) *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford: Oxford University Press.
- O'Donnell, G. & Philippe C. Schmitter. (1986) 'Tentative Conclusions about Uncertain Democracies' in Guillermo O'Donnell, Philippe Schmitter & Laurence Whitehead (eds.), *Transitions from Authoritarian Rule: Prospect for Democracy*. Baltimore and London: John Hopkins University Press, pp. 3–72
- Petras, James. (2003) The Responsibility of the Intellectuals: Cuba, the U.S. and Human Rights, *paper*, 1 Mei.
- Petras, James, & Henry Veltmeyer. (2001) *Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century*. London: Zed Books.
- Riain, Sean O. (2000) States and Markets in an Era of Globalization. *Annual Reviews Sociology*, No. 26, hal. 187–213.
- Seidman, Steven. (1998) *Contested Knowledge: Social Theory in the Postmodern Era*, Second edition. Massachusetts: Blackwell Pub.
- Soros, George. (2000) *Open Society: Reforming Global Capitalism*. New York: Public Affairs.
- Tonkiss, Fran. (2006) *Contemporary Economic Sociology: Globalization, Production, Inequality*. NY: Routledge.
- Urbinati, Nadia. (1998) From the Periphery of Modernity: Antonio Gramsci's Theory of Subordination and Hegemony, *Political Theory*, Vol. 26, No. 3, June. London, Sage Pub, Inc. h. 370–391
- Wallerstein, I. (1984) *The Politics of the World Economy*. Cambridge: Cambridge Univ. Press.
- Wallerstein, I. (2004) *The Uncertainties of Knowledge*. Philadelphia: Temple Univ. Press.

Weber, Max. (1978) dalam Guenter Roth & Claus Wittich (ed.). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Univ. of California Press, Berkeley, California.

William, Patrick & Laura Chrisman (eds.) (1994) *Colonial Discourse and Postcolonial Theory*. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.